

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Perikanan Nomor:
73/Pid-Sus-Prk/2017/PN.Ranai)**

GANJIL SUNARTO

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan penindakan terhadap tindak pidana perikanan pada Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ranai dalam sistem hukum Indonesia. Dan untuk menjelaskan tentang mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. *Teori yang digunakan* adalah teori kehendak, teori penegakan hukum dan teori pemidanaan. *Metode penelitian* yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan hukum normatif akan dianalisa norma-norma hukum yang berlaku, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan juga dalam berbagai putusan pengadilan yang berisi putusan Perbuatan melawan hukum yang berasal dari perjanjian sewa beli. *Hasil penelitian*, bahwa pada pelaksanaan penindakan terhadap tindak pidana perikanan pengaturannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dari terjadinya kejahatan dan pelanggaran sebagaimana disebutkan pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan merujuk pada ketentuan Bab XIV Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dilakukan dengan melaksanakan penyidikan, penuntutan, barang bukti dan pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan. *Simpulan*, dirumuskan bahwa pengaturan penindakan terhadap tindak pidana perikanan dalam sistem hukum Indonesia tidak efektif dalam menanggulangi perbuatan pencurian ikan (*illegal fishing*) yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) disebabkan karena di dalam praktik pemidanaan terhadap ketentuan tindak pidana perikanan masih terdapat perlakuan khusus bagi pelaku tindak pidana perikanan berkewarganegaraan asing yang tidak menimbulkan efek jera. Untuk mengatasi kendala dalam penindakan terhadap tindak pidana perikanan guna meningkatkan penegakan hukum maka diperlukan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menjalin perjanjian bilateral dengan negara-negara lain sehingga dapat diterapkan pemidanaan yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana berkewarganegaraan asing yang melakukan perbuatan pencurian ikan (*illegal fishing*) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

**LAW ENFORCEMENT IN THE ERADICATION OF CRIMINAL ACTIONS
OF FISHERY IN THE INDONESIAN EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (ZEEI)
(Case Study of Fisheries Court Decision Number:
73 / Pid-Sus-Prk / 2017 / PN.Ranai)**

GANJIL SUNARTO

ABSTRACT

This research was conducted to find out and explain about the regulation of prosecution for fisheries crime in Decision Number 73 / Pid.Sus-Prk / 2017 / PN Ranai in the Indonesian legal system. And to explain about overcoming obstacles in law enforcement against fisheries crime. The theory used is will theory, law enforcement theory and punishment theory. The research method used is normative legal research, with a normative legal approach to analyze the norms of the applicable law, which are contained in statutory regulations and also in various court decisions containing decisions on illegal acts originating from the rental purchase agreement. The results of the study, that in the implementation of prosecution against fisheries crime, the regulation is based on Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries from the occurrence of crimes and violations as stated in Article 103 of Law Number 31 of 2004 jo. Law Number 45 of 2009. Law enforcement in fisheries crime refers to the provisions of Chapter XIV of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries with several amendments based on Law Number 45 of 2009 carried out by carrying out investigations, prosecutions, evidence and examination at the fisheries court hearing. In conclusion, it is formulated that the regulation of prosecution against fisheries crime in the Indonesian legal system is not effective in tackling illegal fishing that occurs in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) because in the practice of criminalization against the provisions of fisheries crime there is still treatment. especially for foreign fisheries perpetrators that do not cause a deterrent effect. To overcome obstacles in prosecution of fisheries crime in order to improve law enforcement, it is necessary to make efforts by the Government of Indonesia to enter into bilateral agreements with other countries so that penalties can be applied which can have a deterrent effect on foreign criminals who commit illegal fishing. (illegal fishing) in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI).